

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN SIKAP KEWARGANEGARAAN
MAHASISWA**

Rafli Faturrahman¹, Khania Evline Lorenca Br Karo², Rasentri Mey Sinaga³
raflifaturrahman1605@gmail.com¹, khania Lorenca@gmail.com², rasentrimaysinaga@gmail.com³
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran fundamental dalam membentuk warga negara yang berkarakter, demokratis, dan bertanggung jawab. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan hakekat pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu proses pedagogis yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku kewargaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana strategis dalam membangun identitas nasional dan memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus dilandasi oleh pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, serta tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan tidak boleh dipahami secara sempit sebagai transfer pengetahuan, melainkan sebagai upaya integral dalam membentuk warga negara yang kritis, partisipatif, dan berintegritas.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Kewargaan, Demokrasi, Nilai Pancasila, Tanggung Jawab Sosial.

Abstract

Civic education has a fundamental role in forming citizens with character, democracy, and responsibility. This study aims to describe the nature of civic education as a pedagogical process that not only focuses on cognitive aspects, but also on the formation of civic attitudes and behaviors in accordance with Pancasila values. Through a descriptive-qualitative approach, this study emphasizes the importance of civic education as a strategic means in building national identity and strengthening citizen participation in national and state life. The results of the study indicate that civic education must be based on a deep understanding of the principles of democracy, human rights, and social responsibility. Thus, civic education should not be understood narrowly as a transfer of knowledge, but rather as an integral effort in forming critical, participatory, and integrity-based citizens.

Keywords: Civic Education, Civic Character, Democracy, Pancasila Values, Social Responsibility.

PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diarahkan untuk menanamkan pengetahuan tentang sistem pemerintahan dan hukum, melainkan juga untuk membentuk karakter, sikap, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan dinamika sosial-politik telah membawa tantangan baru bagi pendidikan kewarganegaraan. Fenomena melemahnya rasa nasionalisme, meningkatnya intoleransi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi menuntut adanya penguatan kembali terhadap esensi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hakekat pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat penting agar pelaksanaannya tidak sekadar menjadi mata pelajaran formal, tetapi juga mampu membentuk identitas dan tanggung jawab kewarganegaraan secara substantif.

Dalam kerangka tersebut, hakekat pendidikan kewarganegaraan harus dipahami sebagai proses pedagogis yang bersifat multidimensional, yang mencakup dimensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang demokratis, kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan publik. Dengan memahami hakekat tersebut secara mendalam, diharapkan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dapat lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan kebangsaan di era kontemporer.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode wawancara. Metode penelitian wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan melalui interaksi verbal antara pewawancara (peneliti) dan narasumber (informan). Tujuannya adalah untuk menggali informasi, pandangan, pengalaman, dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena dari sudut pandang narasumber. Wawancara ini penulis lakukan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu secara mendalam mengenai topik Pendidikan Kewarganegaraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui metode wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan siswa SMA Swasta Methodist Berastagi, diperoleh beberapa temuan penting mengenai persepsi dan pemahaman mereka terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn):

1. Pemahaman Konseptual yang Variatif

Mahasiswa cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dasar kewarganegaraan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, siswa SMA umumnya memiliki pemahaman yang lebih terbatas dan normatif, namun tetap menunjukkan antusiasme dalam memahami nilai-nilai dasar kebangsaan seperti Pancasila dan semangat persatuan.

2. Nilai yang Diinternalisasi

Kedua kelompok responden menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab sosial telah mulai ditanamkan melalui pembelajaran PKn. Namun demikian, sebagian mahasiswa menyampaikan bahwa implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata masih menjadi tantangan karena pengaruh lingkungan sosial dan media.

3. Persepsi terhadap Relevansi PKn

Sebagian besar narasumber menganggap Pendidikan Kewarganegaraan masih relevan dan penting, terutama dalam konteks menjaga integritas nasional di tengah pengaruh budaya asing dan arus informasi global. Mereka juga menyoroti bahwa mata pelajaran atau mata kuliah ini seharusnya lebih interaktif, tidak hanya berupa hafalan teori, tetapi melibatkan diskusi kasus-kasus nyata.

4. Partisipasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Mahasiswa cenderung menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan diskusi politik kampus, yang merupakan wujud nyata dari praktik kewargaan. Di sisi lain, siswa SMA masih berada dalam tahap awal membangun kesadaran akan pentingnya berpartisipasi secara aktif dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

5. Harapan terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Banyak responden berharap PKn lebih dikembangkan ke arah pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Beberapa mengusulkan agar pendidikan kewarganegaraan mengangkat isu-isu kontemporer seperti toleransi antaragama, disinformasi di media sosial, serta radikalisme, agar pembelajaran lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dampak positif dalam membentuk kesadaran dan karakter warga negara, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pembelajaran PKn yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu mampu mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan sekaligus membentuk perilaku yang sesuai dengan semangat demokrasi dan keadilan sosial.

Secara teoritis, hasil ini mendukung pandangan Zulfikar dan Dewi (2021) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pilar penting dalam pembentukan jati diri bangsa. Implementasi pembelajaran PKn yang berorientasi pada pengembangan karakter dan integritas pribadi mampu menjadi solusi terhadap krisis moral yang kerap dialami generasi muda di era digital.

Selanjutnya, hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa lebih siap dalam menerjemahkan nilai-nilai PKn ke dalam tindakan konkret, seperti aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial. Hal ini menguatkan temuan Widiatmaka (2021) bahwa PKn di tingkat perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai wahana transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan identitas dan komitmen kebangsaan.

Sementara itu, pada tingkat SMA, pemahaman siswa masih dominan pada aspek normatif dan kurang kontekstual. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan metode pembelajaran, seperti penggunaan pendekatan berbasis proyek, simulasi demokrasi, atau pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Perubahan tersebut akan menjadikan PKn lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Isu-isu kontemporer seperti disinformasi digital, intoleransi, dan krisis identitas juga harus diintegrasikan dalam kurikulum PKn. Dengan cara ini, pendidikan kewarganegaraan dapat membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis, empati sosial, dan ketahanan ideologis, yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus terus dikembangkan sebagai proses yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman. Keterlibatan semua pihak—guru, dosen, pembuat kebijakan, dan masyarakat—sangat penting agar tujuan utama PKn, yaitu membentuk warga negara yang baik dan bertanggung jawab, dapat terwujud secara nyata.

KESIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, kritis, dan berintegritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik mahasiswa maupun siswa menyadari pentingnya nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas kewargaan. Penanaman nilai-nilai tersebut tidak hanya membangun kesadaran individual, tetapi juga memperkuat partisipasi kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pengajaran normatif semata, melainkan harus dilaksanakan secara holistik yang menyentuh seluruh dimensi manusia—kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah maupun perguruan tinggi perlu diarahkan pada pembentukan sikap, perilaku, dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi digital, termasuk tantangan society 5.0, pendidikan kewarganegaraan juga dituntut untuk adaptif dan relevan. Mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan harus dibekali tidak hanya dengan wawasan kebangsaan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kepekaan sosial, dan kemampuan kolaboratif yang tinggi. Dengan pendekatan yang inovatif dan kontekstual, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi pilar utama dalam membangun generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pendidik, lembaga pendidikan, serta kebijakan nasional dalam memperkuat peran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan ini harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan dinamika masyarakat agar mampu menjawab kebutuhan zaman dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa yang adil, berdaulat, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Erinaldy Elza Sevira. 2021. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan bagi Mahasiswa. IMM JPMIPA UAD.
- Zulfikar Fikri Muhamad,dkk. 2021. Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Jurnal PEKAN Vol.6, No.1.
- Afrizal Nur Muh. 2022. Urgensi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Kalangan Mahasiswa Pada Zaman Milenial. Jurnal Kewarganegaraan Vol.6, No.1.
- Widiatmaka Pipit. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Karakter Pancasila di Perguruan Tinggi. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol.1, No.2.
- pada mahasiswa keperawatan. J Kesmas Komunitas. 2020;12(1):55–62.